



**DORONG PARTISIPASI KELOMPOK RENTAN**

## Yogya Komitmen Wujudkan Kota Inklusi

**YOGYA (KR)** - Meski belum ada standar baku, namun Pemkot Yogya akan terus berkomitmen mewujudkan kota inklusi. Salah satunya diwujudkan dengan mendorong partisipasi kelompok rentan mulai dari merencanakan hingga menikmati hasil pembangunan.

Wakil Walikota Yogya yang juga Ketua Pokja Inklusi Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Heroe Poerwadi, mengungkapkan pembangunan kota-kota di dunia saat ini memiliki paradigma baru yakni *city for all*. "Mau tidak mau, setiap kota harus menata diri untuk menjadi kota yang bisa memberikan kesempatan bagi kelompok rentan," tandasnya, Senin (22/10).

Berkaitan dengan hal itu, Humanity & Inclusion (HI) bekerja sama dengan Pemkot Yogya akan menggelar lokakarya nasional selama sehari Selasa (23/10). Lokakarya bakal diikuti seratus delegasi dari berbagai pemerintah kota serta pegiat penyandang disabilitas itu akan mengupas mengenai implementasi pembangunan inklusif. Masing-masing daerah diharapkan saling bertukar pengalaman terkait program berbasis inklusi yang sudah dilakukan.

Khusus di Kota Yogya, in-buh Heroe, kota inklusi sudah diawali dengan kebijakan afirmasi yang menasar lima kelompok. Masing-masing kelompok disabilitas, warga miskin, perempuan, anak, dan lansia.

"Setiap kebijakan di Kota Yogya harus bisa memberikan peluang bagi lima kelompok tersebut. Dari aspek fisik, seluruh bangunan baru di lingkungan Pemkot sudah mempertimbangkan akses penyandang disabilitas," urainya.

Hanya, sektor swasta masih perlu didorong agar turut memiliki paradigma inklusif. Di antaranya hotel maupun pusat perbelanjaan yang seharusnya menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Pemkot akan terus mendesak agar rancangan perda yang tengah dibahas oleh dewan dapat segera diselesaikan.

Penasehat Teknis untuk Inklusi Disabilitas dan Gender Anggia Sari Puji Aryati, mengaku pemerintah sudah banyak mengulirkan program berbasis inklusi. Hanya, informasi mengenai hal itu masih belum tersosialisasikan dengan baik. Akibatnya, masih banyak penyandang disabilitas yang belum memahami bagaimana mengakses program berbasis inklusi. "Kami pun menyadari, banyak penyandang disabilitas yang sejak kecil 'disembunyikan' oleh orangtua sehingga perlu mendapat dukungan pendidikan," katanya.

Sementara Country Contributor HI Indonesia Swatika Eka Satiyono, berharap setiap pemerintah daerah bisa terus bersinergi dalam mengimplementasikan kebijakan inklusif. Tidak lagi saling mengkritik, melainkan juga memberikan solusi agar program tersebut bisa dijalankan oleh daerah lain.

"Harapan kami, forum lokakarya nantinya bisa menjadikan langkah awal dalam mempersatukan persepsi terhadap kebijakan inklusi. Apa yang sudah diperbuat di daerah lain, bisa dicontoh oleh daerahnya," jelasnya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005